

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Kota Makassar)**

SKRIPSI



**ZULFINA RAHMI
NIM: 105731120919**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**JUDUL PENELITIAN:
PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Kota Makassar)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ZULFINA RAHMI
NIM : 105731120919**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Direndahkan oleh manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah Rabbil’alamin**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta serta Orang-orang yang saya sayang dan almamater kebangganku

PESAN DAN KESAN

“Masa depan adalaah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris
Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : Zulfina Rahmi
No. Stambuk/ NIM : 105731120919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

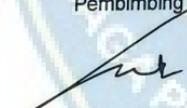
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Januari 2024 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Februari 2024

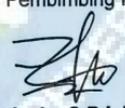
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA

NIDN: 0906126701


Sitti Zulaeha,S.Pd.,M.Si

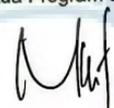
NIDN : 0919118704

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dis. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM : 651 507


Mira, SE.,M.Ak., Ak

NBM : 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Zulfina Rahmi, Nim : 105731120919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 18 Rajab 1445 H /30 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM
2. Mira, SE., M.Ak
3. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si
4. Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.,Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTA EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfina Rahmi
Stambuk : 105731120919
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar) Sulawesi Selatan Kota Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M



ng Membuat Pernyataan,

Zulfina Rahmi

NIM: 105731120919

Diketahui Oleh:



Dekan

Dr. H. Andi Jamran, S.E., M.Si.

NBM:651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak

NBM:1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfina Rahmi
NIM : 105731120919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap KepatuhanWajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,



Zulfina Rahmi
NIM: 105731120919

ABSTRAK

ZULFINA RAHMI, 2023. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar). Skripsi, Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Arman dan Pembimbing II Sitti Zulaeha

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Aparatur Sipil Negara di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan memperoleh sampel sebanyak 121 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Aparatur Sipil Negara. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penerapan sistem *e-filing* terbukti meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN.

Kata Kunci : *E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.*



ABSTRACT

ZULFINA RAHMI, 2023. *The Impact of E-Filing System Implementation on Taxpayers' Compliance (Empiric Study on ASN of South Sulawesi Provincial House of Representatives, Makassar City)*. Thesis, Accounting Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Makassar. Mentored by Supervisor I Andi Arman and Supervisor II Sitti Zulaeha

This study aims to determine the effect of the application of the e-filing system on the compliance of individual taxpayers of the State Civil Apparatus at the South Sulawesi Provincial DPRD Office. This type of research is quantitative research with a descriptive approach. The data collection technique in this study used a questionnaire and obtained a sample of 121 respondents. The data analysis method used is simple linear regression analysis. The results showed that the application of the e-filing system had a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers of the State Civil Apparatus. From these results it can be seen that the application of the e-filing system is proven to increase ASN Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *E-Filing, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers.*



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis kirimkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan bagi semua umat dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu pada bangku kuliah.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yang terkasih dan tersayang bapak Samli dan ibu Rahbiah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, memberi dukungan moril dan materi serta tidak hentinya memberikan doa yang tulus kepada penulis, terima kasih. Selesaiannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati juga mengucapkan terimakasih kepada;

1. **Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. **Dr.H. Andi Jam’an, SE.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.

3. **Mira, SE., M.Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.
4. **Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA** selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat dalam penyusunan proposal dan tugas akhir.
5. **Sitti Zulaeha,S.Pd.,M.Si** selaku pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen, staff dan karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Terimakasih untuk kedua orang tuaku tercinta, saudara/(i) ku serta seluruh keluargaku yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabatku **Suci Magfirah Nur S.Ak, Nurfahmi S.Ak dan Andi Muhammad Fadhlán S.T** terimakasih banyak atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis di saat masa sulit mengerjakan skripsi ini. See you on top guys.
9. Terimakasih untuk rekan-rekan kerja saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, dukungannya, kebersamaan serta doa yang diberikan untuk saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Saudara – saudari seangkatan seperjuanganku di jurusan akuntansi angkatan 19, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu,

terimakasih atas segala bantuan dukungan, kebersamaan serta doa yang diberikan.

11. Terima kasih kepada para ASN yang ada di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi selatan, yang telah bersedia menerima dan meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Januari 2024

Zulfina Rahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Teori Lereng Licin (<i>Theory of Slippery Slope</i>).....	8
2. Technology Acceptance Model (TAM).....	9
3. Pajak	11
4. Pajak Penghasilan (PPh).....	14
5. E-Filing	16
6. Kepatuhan Wajib Pajak	18
B. Tinjauan Empiris.....	21
C. Kerangka Konseptual	28
D. Hipotesis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Definsi Operasional Variabel	33
G. Metode Analisis Data.....	35
H. Uji Hipotesis	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian.....	58
C. Analisis Data	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Penskoran Jawaban.....	33
Tabel 3. 2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	34
Tabel 4. 1 Deskripsi Hasil Penyebaran Kuesioner	58
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan	59
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan	60
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan	61
Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel X.....	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel WPOP ASN (Y).....	62
Tabel 4. 8 Uji Reabilitas Variabel X.....	63
Tabel 4. 9 Uji Reabilitas Variabel Y.....	64
Tabel 4. 10 Uji Normalitas.....	64
Tabel 4. 11 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier SPSS 23.....	67
Tabel 4. 13 Hasil Uji t.....	68
Tabel 4. 14 Kuesioner Mengenai Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Theory of Slippery Slope	9
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep.....	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan .	50
Gambar 4. 2 Scatterplot Heteroskedastisitas	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Nanang (2017). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan dana yang cukup besar yang sebagian besar harus berasal dari sumber daya sendiri. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Rahayu (2021).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Penerimaan pajak dimaksudkan untuk mendorong keberhasilan fungsi pemerintahan secara keseluruhan, serta dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu negara. Besar kecilnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Lado & Budiantara (2018) Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan with holding system. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut Self Assessment System yaitu suatu sistem di mana wajib pajak diberi

kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku Muhammad & Sutjahyani (2018)

Seiring dengan evolusi era informasi, teknologi juga berkembang pesat di dunia. Salah satu dampak kemajuan teknologi adalah perubahan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dilakukan melalui pemanfaatan sistem *e-filing* dalam pelaporan pajak. Pradilatri et al. (2021) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara elektronik. Presiden Republik Indonesia bersama DJP membuat sistem *e-filing*. Sistem ini disebut sistem pengarsipan elektronik, yang memanfaatkan laporan pajak yang disampaikan secara elektronik, hal ini dilakukan melalui sistem online yang real time Wahyudi (2021).

Wahyudi (2021) memaparkan bahwa *e-filing* adalah layanan yang memudahkan pengisian dan penyampaian SPT secara elektronik melalui sistem online real time ke Ditjen Pajak melalui internet di website Ditjen Pajak secara langsung atau melalui penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* ini dimaksudkan untuk meringankan dan mempermudah proses penyampaian dan pengiriman pajak (SPT) wajib pajak, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. *E-filing* dapat menekan waktu dan biaya karena hanya perangkat yang terkoneksi internet saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan SPT,

penyampaian tersebut dapat dilakukan kapan saja, siang maupun malam setiap harinya Muhammad & Sutjahyani (2018). Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk. Selain itu dengan adanya sistem *e-filing* dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas Rifani & Lestari (2022)

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan sehingga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran publik dan keinginan untuk teratur sebagai pembayar pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem tersebut.

Komara (2019) Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mempan RB) Nomor 8 Tahun 2015 memberikan peraturan tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melalui *E-filing*.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri sipil merupakan Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Sipil Negara Ednoer et.al (2023)

Menurut penulis dengan adanya sistem *e-filing* mampu membuat masyarakat untuk lebih taat lagi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan mudah. Sari (2021) penggunaan *e-filing* memanfaatkan jaringan internet dan pemahaman penggunaan *e-filing*, maka untuk dapat menggunakan *e-filing* wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Dengan perkembangan serta pertumbuhan pengguna internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan bisa memberikan akibat positif pada aspek perpajakan, salah satunya ialah pelaksanaan sistem *e-filing* yang lebih baik. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya Y. Mulyati & Ismanto (2021)

Putri (2018) Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahamannya tentang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah juga mereka paham tentang peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap telah memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurhamid (2018) tentang "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari". Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalsari 2019.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhayati dan Sulistyowati (2021) tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Pemahaman Masyarakat mengenai Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Widya Wiyata Sidoarjo namun pada variabel pemahaman internet menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Widya Wiyata Sidoarjo.

Namun kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istutik dan Dwi Suci Pertiwi (2021) tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapula penelitian yang berkaitan tentang *e-filing* yang dilakukan oleh Rifani dan Lestari (2022) tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan peran *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, terlihat adanya perbedaan terhadap hasil yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama

mengenai *e-filing* namun dengan variabel, tempat dan metode penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang

khususnya berkaitan dengan Pengaruh Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat :

1) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang mudah dipahami sehingga pemahaman wajib pajak semakin meningkat dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak juga dapat ditingkatkan.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang mudah dipahami dan dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan kualitas penerapan *e-filing* dan saksi perpajakan kepada wajib pajak sehingga memicu kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

3) Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

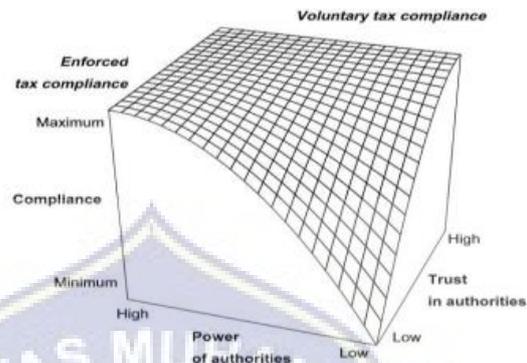
1. Teori Lereng Licin (*Theory of Slippery Slope*)

Sebuah teori “Lereng Licin” atau *slippery slope theory*, yang diperkenalkan oleh Kirchler et al.(2008) yang mengemukakan bahwa *teori slippery slope framework*, menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Paduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak serta penegakan hukum bisa secara efisien menurunkan ketidakpatuhan pajak Hakim (2017).

Theory of Slippery Slope adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu *Power of Authorities* dan *Trust in Authorities* Kirchler et al.(2008) dalam Hakim, Handajani, & Inapty (2017). Kekuatan Otoritas (*Power of Authorities*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Sedangkan kepercayaan terhadap otoritas (*Power of Authorities*) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak Kirchler et al.(2008)

Ratmono (2019) Kepatuhan dalam teori *slippery slope framework* dibagi menjadi dua yaitu *enforced tax compliance* dan *voluntary tax*

compliance. Model ini digambarkan oleh grafik tiga dimensi seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 1 Theory of Slippery Slope

Teori slippery slope menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan deterrence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*valuntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*).

Berdasarkan teori *slippery slope* ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela Manan et al.(2021).

2. Technology Acceptance Model (TAM)

Wahyudi (2021) *Technlogy Acceptance Model* (TAM) merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem

teknologi informasi. TAM (*Technology Acceptance Model*) merupakan penyesuaian dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986. Tujuan TAM lebih dikhususkan untuk menjelaskan perilaku para pengguna komputer (*computer usage behavior*). Nesdi Evryliyan Rozanda (2017) Terdapat lima konstruk dalam Technology Acceptance Model (TAM), antara lain sebagai berikut :

- 1) Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat memudahkan suatu tugas.
- 2) Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya.
- 3) Sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*)
- 4) Minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*)
- 5) Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology usage*)

Dari lima konstruk tersebut persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan merupakan salah satu penentu sebuah sistem dapat diterima atau tidak Caroline (2021). Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

3. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat berbagai macam pengertian pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya *Lebih Dekat Dengan Pajak (2013)*, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Solekhah (2018).

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontra prestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Aisyah 2015). Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjajaa mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum Gusman (2014).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain :

- 1) Kontribusi wajib pajak negara
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- 3) Pemungutan pajak bersifat memaksa

- 4) Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung
- 5) Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas

2. Fungsi pajak

Solekhah (2018) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (anggaran); sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- 2) Fungsi reguler (mengatur); merupakan fungsi dimana pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- 3) Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi distribusi pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungutannya Anugrahi et al. (2018)

1) Menurut Golongan (Pembebanan)

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti melimpahkan keadaan diri wajib pajak (PPh).
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Pajak Penghasilan (PPH)

1) Teori Pajak Penghasilan

Ngadiman (2021) pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2014) PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yaitu telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila tidak memiliki subjek pajak, maka tidak dapat dikenakan pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan Pradnyana & Prena (2019).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

2) Subjek Pajak Penghasilan

Alfian (2013) subjek pajak adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia untuk orang pribadi ataupun badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Yang termasuk subjek pajak adalah antara lain :

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Misalnya, tempat kedudukan manajemen, kantor perwakilan, pabrik, bengkel dan gedung kantor.

Selain itu, Shofira (2021) wajib pajak penghasilan dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak dalam negeri (SPDN) dan wajib pajak luar negeri (SPLN).

5. E-Filing

1) Pengertian *E-Filing*

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sedangkan menurut Nurhayati (2019) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online yang real time. Jadi, *e-filing* adalah sistem online yang terhubung melalui internet yang dapat mempermudah wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam menyampaikan SPT-nya yang dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>. Sistem *e-filing* ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Budiarto (2022) penggunaan *e-filing* merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak menggunakan sistem *e-filing* untuk melaporkan SPT secara online. *E-filing* diciptakan dengan tujuan memberi keuntungan dan kemudahan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaporan SPT. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online dan realtime yang diterapkan oleh DJP.

Kriteria yang digunakan untuk menilai penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak yaitu ketika :

1. Wajib pajak selalu menggunakan *e-filing* setiap kali melaporkan pajaknya.

2. Wajib pajak berkehendak untuk melanjutkan menggunakan *e-filing* di masa depan.
3. Wajib pajak menggunakan *e-filing* karena mempunyai fitur yang membantu pekerjaannya.

2) Penerapan *E-Filing*

Menurut A. Mulyati and Lia (2013) pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak terlalu perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendapatan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Menurut Waluyo (2014), indikator yang digunakan untuk menilai kegunaan penggunaan *E-filing* yaitu :

- a. Meningkatkan performa pelaporan pajak.
- b. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak.
- c. Menyederhanakan pelaporan pajak.
- d. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pradnyana et al.(2019)

6. Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengertian Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat didefinisikan sebagai sifat patuh, ketaatan dari setiap warganya terhadap peraturan dan undang-undang. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa :

- a. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan
- b. Kepatuhan dalam melunasi utang pajak, dan
- c. Kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

Menurut Siti Kurnia (2013), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Puput Tri Aryobimo (2012) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2) Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

3) Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Saputri & Rahayu (2021), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada wajib pajak atas kemauan dan keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan dan faktor perbedaan.

2. Pengaruh Budaya

Konsep budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang berbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3. Pengaruh Agama

Di Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang di anut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah :

- 1) Wajib Pajak mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.
- 2) Wajib pajak wajib membayar kewajiban pajaknya pada kantor pajak yang ada di daerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui wajib pajak sendiri.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah terdaftar pada kantor pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu atau ringkasan penelitian sebelumnya mengenai Penerapan Sistem *E-filing* antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Lia Pramudya (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing System</i> dan <i>Taxpayer Awareness</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan).	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan <i>e-filing system</i> dan <i>taxpayer awareness</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dapat memoderasi atau memperlemah interaksi atau penerapan <i>e-filing system</i> dengan kepatuhan wajib pajak.
2.	Puput Solekhah dan Supriono (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Kuantitatif	1. Penerapan sistem <i>E-filing</i> tidak berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib

		Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo		pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Nense Wulan Sari (2021)	Pengaruh Penerapan E-billing dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-biling memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Penerapan <i>E-filing</i> memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Mortigor Afrizal Purba, (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan <i>E-filing</i> dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem <i>E-filing</i> tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif

		Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam.		dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 4. Sanksi pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Tiwuk Puji Hariyanti (2020)	Implementasi E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Moderasi Pemahaman Internet.	kuantitatif.	Terdapat pengaruh implementasi <i>e-filing</i> pada kepatuhan wajib pajak secara positif dan juga signifikan yang dibuktikan pada nilai F sebesar 34,401.
6.	Eka Rizqi Adhayati (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Pemahaman	Kuantitatif	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan

		Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.		Wajib Pajak Widya Wiyata Sidoarjo namun pada variabel pemahaman internet yang menunjukkan bahwa pemahaman aianternet ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Widya Wiyata Sidoarjo.
7.	Hilmi Fauzan Kusumafant o (2018)	Pengaru Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta).	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan biaya kepatuhan pajak yang yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Penerapan system <i>E-filing</i> memiiki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

				pajak.
8.	Ninis Nur Solichah (2019)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak. Pada sanksi pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan yang paling tinggi hasil pengujiannya.
9.	Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet	Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survey. Sumber data yang digunakan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan system

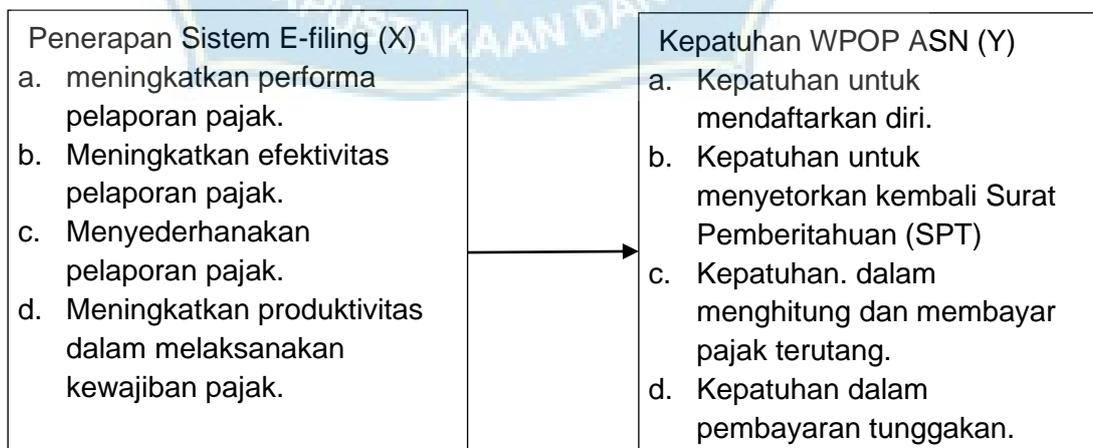
		Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)	penelitian ini adalah data primer yaitu pemberian kuesioner kepada WPOP PNS yang bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan metode <i>proportionate stratified random sampling</i> .	<i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS.
10.	M. Adil Rosadi (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kausatif untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

				Kepatuhan Wajib Pajak
--	--	--	--	-----------------------

Berdasarkan tabulasi pada hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-aspek yang berhubungan dengan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian dan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel *independent* (bebas) dengan variabel *dependent* (terikat). Dimana yang menjadi variabel *independent* (bebas) adalah sistem *e-filing* (X) dan yang menjadi variabel *dependent* (terikat) adalah Kepatuhan WPOP (Y). kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan yang tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan WPOP ASN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar. Hal ini disebabkan penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena sistem *e-filing* memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pembayar pajak seperti mudah digunakan, memiliki sistem kelenturan, ketersediaan sistem, dan kemudahan belajar, serta fitur sistem seperti fitur sistem pajak, intuitif, dan waktu respon, yang dapat dengan mudah dipahami oleh wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Wajib Pajak ASN akan lebih patuh jika telah menerapkan sistem *e-filing* apalagi sistem ini berbasis teknologi yang akan lebih mempermudah dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2019), berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih (2018), Penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Dari kedua penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Penerapan Sistem E-filing berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji suatu teori, menyajikan fakta atau informasi yang relevan, atau menggambarkan statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang terkait. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi ASN di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar. Jenis penelitian ini dianggap kausal, karena penelitian ini menguji kaitan atau hubungan antara dua atau lebih variabel yang diteliti (Syafira 2018).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur secara langsung, yang berupa informasi atau data yang

dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka yang diperoleh sehingga nantinya masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh misalnya benda, atau orang tempat peneliti melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian kuantitatif ada dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber dokumentasi perusahaan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan daftar penerimaan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Sumber data primer dapat diperoleh melalui survey dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat penelitian, khususnya pada ASN Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

D. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Sugiyono (2019) populasi merupakan keseluruhan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan batasan dan memiliki sifat tertentu yang memungkinkan peneliti dapat membuat kesimpulan disebut wilayah generalisasi. Adapun dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 121 ASN.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan kata lain sampel adalah populasi dalam bentuk mini (*miniatur population*). Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampel jenuh dimana penarikan sampel yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner dan dokumentasi. Skala jawaban alternatif yang digunakan adalah skala likert yaitu suatu skala psikometrik yang banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ini berisi pernyataan yang sistematis untuk mengukur sikap responden terhadap pernyataan tersebut. Jawaban untuk masing-masing item memiliki gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Penskoran Jawaban

NO	Alternatif Jawaban	Skor Pertanyaan
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber : (Sugiyono, 2015)

F. Definsi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel bebas

(X) dan variable terikat (Y). Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-filing*.

a) Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Tabel 3. 2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Keterangan	Jurnal
Kepatuhan	1. Mendaftarkan diri ke kantor pajak 2. Melapor pajak tepat waktu 3. Membayar pajak dengan jumlah yang benar 4. Menghitung pajak oleh wajib pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi	(Bahri, Diantimala, & Majid 2019)

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju (Sari Nurhidayah, 2015).

b) Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) Sugiyono (2019). Variabel independen dalam penelitian ini

adalah Penerapan Sistem *E-Filing*. Menurut Karina Harjanto (2018), indikator yang digunakan untuk menilai kegunaan penggunaan *e-filing* yaitu:

- a. Meningkatkan performa pelaporan pajak
- b. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak
- c. Menyederhanakan pelaporan pajak
- d. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran penerapan sistem *e-filing*. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju (Sari Nurhidayah, 2015).

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

Menurut Sugiyono (2018), analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian bisa menggunakan tabel, diagram, ukuran dan gambar.

1. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketepatan indikator yang diteliti oleh peneliti (Turnip, 2014). Menurut Cooper (2003) dalam Jumaili (2019), uji validitas menguji seberapa baik satu atau seperangkat instrument pengukuran mengukur dengan tepat suatu konsep studi yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dalam penelitian ketentuan dasar yang digunakan dengan *pearson correlation*, dimana jika tingkat *signifikan* $>0,05$ atau 5% maka *output pearson correlation* dikatakan tidak valid (Nimas, Ayu 2021)

2) Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari *variakonstruk*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji cronbach alpha dimana jika setiap variabel dikatakan reliable saat nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60 ($>0,60$) (Rizki,Eka 2020).

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati

normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji one's sample Kolmogorov smirnov test dan probability plot dengan ketentuan significant > 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal Anindya Celintara (2020).

2) Uji Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun rumus dari regresi linear sederhana, antara lain :

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen (Kepatuhan WPOP)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X : Penerapan Sistem *E-filing*

ε : Error

Dari persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Variabel Independen Penerapan Sistem *E-filing* (X) Terhadap Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi variabel independen (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada pengambilan keputusan untuk uji t parsial dalam analisis regresi adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} : jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS: jika nilai sig > 0.05 , maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai sig < 0.05 , maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hipotesis (dugaan) dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau jika nilai sig > 0.05 .
- 2) H_0 ditolak dan H_1 diterima, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai sig < 0.05

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 59, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Sulawesi Selatan. DPRD Sulawesi Selatan beranggotakan 85 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan terdiri 1 ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Selatan yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 24 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Selatan.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, sebagai unsur Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Kedudukan ini menyebabkan DPRD mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya unit kerja pembantu kesiapan dan kelancaran kegiatan administrasi. Dalam Upaya menyukseskan pelaksanaan tugasnya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki alat kelengkapan yang disebut Sekretariat. Sekretariat ini merupakan unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua DPRD dan teknis administrasi di bawah bimbingan Setwilda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya Sejarah keberadaan sekretariat tidak dapat dipisahkan dengan sejarah keberadaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada awal lahirnya DPRD yang diberi nama DPRD-GR pada tahun 1962, Sekretariat bernama Biro Urusan Dewan berlokasi di jalan Riburane Ujung Pandang (Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I/DKM sekarang). Biro Urusan Dewan selanjutnya menjadi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada saat terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 Tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Perda tersebut, Sekretariat DPRD terbagi atas empat bagian yaitu bagian Umum, Program dan Keuangan, Persidangan dan Perisalah, Pengawasan dan Fasilitas.

2. Fungsi DPRD

- 1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Pembentukan peraturan daerah
 - b. Anggaran
 - c. Pengawasan
- 2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat
- 3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

- 4) Fungsi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- Membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah
 - Mengajukan usul rancangan peraturan daerah
 - Menyusun program pembentukan peraturan daerah Bersama Gubernur
- 5) Program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- 6) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur

3. Hak DPRD

DPRD mempunyai hak :

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Menyatakan pendapat

Pelaksanaan Hak DPRD

a. Hak Interpelasi

Pasal 61

- a) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diusulkan oleh paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.
- b) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD.

- c) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari seperdua dari jumlah anggota DPRD.
- d) Putusan tentang usul hak interpelasi diambil dengan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 62

- a) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan
 - Alasan permintaan keterangan
- b) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- c) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada
 - Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD
- d) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.

Pasal 63

- a) Gubernur dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebaga di

maksud dalam pasal 62, dalam rapat paripurna DPRD

- b) Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjeasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- c) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- d) Terhadap keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pendapat.
- e) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- f) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dijadikan bahan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

b. Hak Angket

Pasal 64

- a) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf B, diusulan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- b) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pemimpin DPRD.
- c) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokument yang memuat sekurang-kurangnya;
 - Materi kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang di

duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- d) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau 64 (enam puluh empat) orang dari jumlah Anggota DPRD.
- e) Usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- f) Apabila rapat paripurna menyetujui usul Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- g) Putusan tentang usul hak angket diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 65

- a) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1).
- b) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , DPRD membentuk panitia hak angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- c) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana di maksud pada ayat (1) , usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 66

- a) Panitia hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) , dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- b) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang di panggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Panitia hak angket melaporkan pelaksanaan tugasnya, dalam rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia hak angket.

Pasal 68

- a) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, DPRD mengusulkan

pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri.

Pasal 69

- a) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- b) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diajukan kepada pimpinan DPRD.
- c) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang membuat sekurang-kurangnya;
 - Menti kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 41
- d) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang di hadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) atau 64 (enam puluh empat) orang dari jumlah Anggota DPRD.
- e) Putusan tentang hak menyatakan pendapat di ambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- f) Usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulanya
- g) Apabila rapat paripurna menyetujui usul Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , pemimpin DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari
- h) Apabila jawaban atas pertanyaan di maksud oleh Gubernur di sampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- i) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan .
- j) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang di tentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- k) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang di tunjuk.

Hak Anggota

Hak Anggota DPRD Antara lain :

- a) Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- d) Memilih dan dipilih;

- e) Membela diri;
- f) Imunitas;
- g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h) Protokoler; dan
- i) Keuangan dan administratif.

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

- a) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah di sertai dengan naskah akademik.
- c) Rancangan peraturan daerah yang di kecualikan disertai naskah akademik adalah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - Rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah
 - Rancangan peraturan daerah tentang APBD
- d) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai penjelasan atau keterangan
- e) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pembentuk peraturan daerah untuk dilakukan pengkajian
- f) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk di sampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah.

- g) Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana pada ayat (2)
- h) Rancangan peraturan daerah sebelum diputuskan menjadi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, para pengusul dapat mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali
- i) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD.
- j) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

3. Visi dan Misi Objek Penelitian

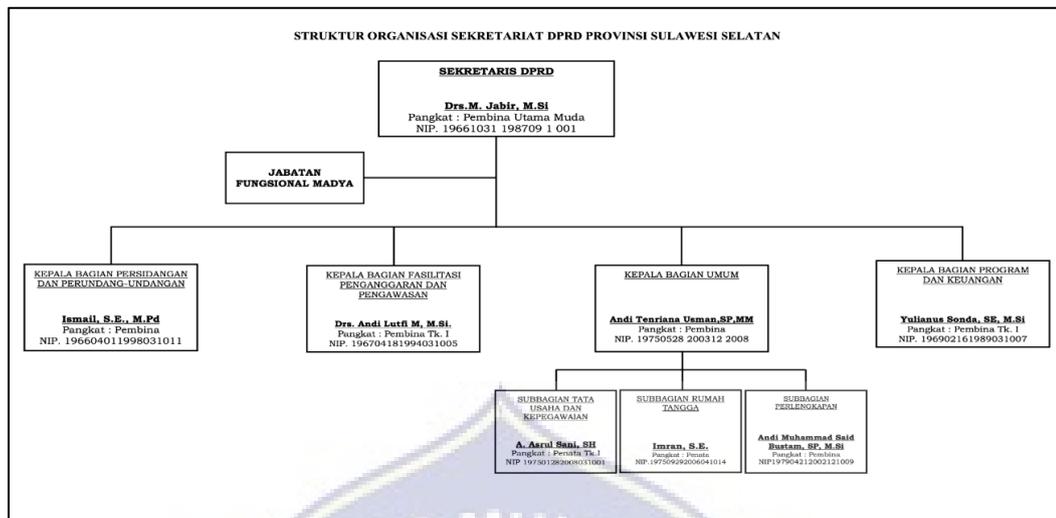
1. Visi

Hadirkan pelayanan kesekretariatan yang berkualitas, responsive, fleksibel dan akuntabilitas dalam mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Misi

- 1) Terwujudnya Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD
- 2) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

3. Struktur Organisasi dan Job Description Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Job Description

a. Sekretaris DPRD

- 1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- 3) Uraian tugas sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e) Menghadiri rapat sesuai bidang tugasnya
- f) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja DPRD
- g) Mengoordinasikan dan merencanakan kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
- h) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan terhadap anggota DPRD
- i) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan terhadap anggota DPRD
- j) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- k) Menyenggarakan penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli DPRD
- l) Meengomunikasikan dan mengharmonisasi tugas dan fungsi antar bagian
- m) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD

- n) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan dewan
 - o) Mengoordinasikan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja setiap fraksi DPRD
 - p) Memfasilitasi ketersediaan sarana kebutuhan kerja tenaga ahli DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - q) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
 - r) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi
 - s) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - t) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan melaporkan tugas operasional kepada pemimpin DPRD.
- b. Bagian Umum
- 1) Bagian umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan administrasi Kesekretariatan DPRD.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a) Perencanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, kerumahtanggaan serta perlengkapan;

- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, kerumahtangaan serta perlengkapan;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, kerumahtangaan serta perlengkapan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan perintah Pimpinan.
- 3) Uraian tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a) Menyusun rencana kegiatan Bagian Umum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
 - e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam mengoordinasikan dan melakukan pelayanan urusan tata usaha dan kepegawaian, seperti :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
 - c) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- **Subbagian Rumah Tangga** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam mengoordinasikan dan melakukan pelayanan urusan kerumahtanggaan, seperti :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian rumah tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
 - c) Mengoordinasikan dan melakukan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD.
 - d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - e) Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.
 - **Subbagian Perlengkapan** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Bagian Umum dalam

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan urusan perlengkapan, seperti :

- a) Mengkoordinasikan dan melakukan distribusi dan pengendalian bahan perlengkapan
 - b) Mengkoordinasikan dan mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
 - c) Melakukan perencanaan pemeliharaan alat perlengkapan
 - d) Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung
 - e) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bagian Program dan Keuangan
- 1) Bagian program dan keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan perencanaan penganggaran, verifikasi keuangan, dan akuntansi pelaporan;
 - b) Pengekoordinasian dan pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan, verifikasi keuangan, akuntansi dan pelaporan;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan perencanaan dan keuangan, verifikasi keuangan, akuntansi dan pelaporan; dan

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan perintah pimpinan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan pimpinan pemerintah.

3) Uraian tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a) Menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- 1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a) Perencanaan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerja sama dan aspirasi.
 - b) Pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerja sama dan aspirasi.
 - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan perintah pimpinan.

- 3) Uraian tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a) Menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
 - c) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh ASN di Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Selatan, peneliti menggolongkan ke dalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan berdasarkan pengalaman penggunaan *e-filing* ASN.

Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel 2010* dan analisis data menggunakan software perangkat lunak *IMB SPSS Statistic 23*. Berikut adalah hasil dari penyebaran kuesioner kepada ASN di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan informasi mengenai identitas responden dan variabel yang diteliti.

Tabel 4. 1 Deskripsi Hasil Penyebaran Kuesioner

Jumlah reponden	121
Jumlah kuesioner yang disebar	121
Jumlah kuesioner yang dikembalikan	121
Total angket yang diterima kembali dari seluruh responden	121
Akurasi pengisian kuesioner responden	100%

2. Karakteristik Responden

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan data karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan berdasarkan pengalaman *e-filing* ASN. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai nilai variabel penelitian.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	68	56,2%
2	Perempuan	53	43,8%
	Total	121	100

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 68 orang atau sebesar 56,2% sedangkan responden berjenis kelamin Perempuan sebanyak 53 orang atau sebesar 43,8%.

b. Usia

Berdasarkan usia responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	23-30 Tahun	59	48.76%
2	31-40 Tahun	32	26.45%
3	41-50 Tahun	25	20.66%
4	> 50 Tahun	5	4.13%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat 59 orang responden berusia 20-30 tahun dengan persentase 48,76%, usia 31-40 tahun sebanyak 32 responden dengan persentase 26,45%, usia 41-50 tahun sebanyak 25 responden dengan persentase 20,66%, dan responden yang berumur >50 tahun sebanyak 5 orang.

c. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SMA/SMK	13	10.74%
2	Diploma	6	4.96%
3	S1	74	61.16%
4	S2	26	21.49%
5	S3	2	1.65%
	Total	121	100.00%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan responden didominasi oleh Pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 74 responden atau sebesar 61,16%, Tingkat Pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 26 responden atau sebesar 21,29%, Tingkat Pendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 2 responden dengan persentase 1,65%, Tingkat Diploma sebanyak 6 responden dengan persentase 4,96%, dan untuk responden dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK sebanyak 13 responden dengan persentase sebesar 10,74%.

d. Pengalaman *E-Filing*

Berdasarkan pengalaman *E-filing* responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman *E-Filing*

No	Pengalaman E-Filing	JUmlah Responden	Persentase (%)
1	< 1 Tahun	10	8.26%
2	1-2 Tahun	48	39.67%
3	> 2 Tahun	63	52.07%
	Total	121	100.00%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa wajib pajak ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pengalaman *E-Filing* selama <1 tahun sebanyak 10 responden dengan persentase sebesar 8,26%, yang memiliki pengalaman *E-filing* selama 1-2 tahun sebanyak 48 responden dengan persentase 39,67% dan untuk pengalaman *E-filing* >2 tahun sebanyak 63 responden atau sebesar 52,07%. Dapat disimpulkan bahwa pengalaman Wajib Pajak ASN >2 tahun pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggunakan *e-filing* lebih banyak.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur suatu konsep dengan memastikan kemampuan suatu skala. Uji validitas ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu daftar pertanyaan. Untuk hasil lengkap dari uji validitas adalah sebagai berikut :

1) Variabel Penerapan sistem *E-filing*

Variabel penerapan sistem *e-filing* terdiri dari 8 butir pertanyaan. Hasil uji validitas variabel pelatihan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel X

Pertanyaan	Corrected item-total (r_{hitung})	Nilai Standar (r_{tabel})	Keterangan
X1	0,672	0,1502	Valid
X2	0,647	0,1502	Valid
X3	0,685	0,1502	Valid
X4	0,593	0,1502	Valid
X5	0,613	0,1502	Valid
X6	0,669	0,1502	Valid
X7	0,430	0,1502	Valid

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat jika nilai dari Corrected Item-Total (r_{hitung}) dari setiap pernyataan yang diberikan responden lebih besar dari nilai standar (r_{tabel}) atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil uji kualitas data yang ditunjukkan uji validitas menyatakan variabel penerapan sistem e-filing (X) valid.

2) Variabel WPOP ASN

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN terdiri dari 8 pertanyaan. Hasil uji validitas variabel pelatihan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel WPOP ASN (Y)

Pertanyaan	Corrected item-total (r_{hitung})	Nilai Standar (r_{tabel})	Keterangan
Y1	0,4605	0,1502	Valid
Y2	0,516	0,1502	Valid
Y3	0,8283	0,1502	Valid
Y4	0,5555	0,1502	Valid
Y5	0,7127	0,1502	Valid
Y6	0,7915	0,1502	Valid
Y7	0,6834	0,1502	Valid
Y8	0,8283	0,1502	Valid

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari *Corrected Item-Total* (r_{hitung}) dari setiap pertanyaan yang diberikan responden lebih besar dari nilai standar (r_{tabel}) yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil uji kualitas data yang ditunjukkan uji validitas menyatakan variabel kepatuhan wajib pajak ASN (Y) valid.

2. Hasil Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan konsisten. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu kuesioner yang digunakan peneliti sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian.

a) Penerapan sistem *E-filing*

Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas Variabel X
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	7

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan data tabel 4.3, hasil uji coba instrumen pada 121 responden uji coba kemudian dianalisis menggunakan bantuan SPSS Statistic 23 diperoleh nilai Cronbac'hs Alpha variabel penerapan sistem *e-filing* lebih besar dari 0,1502 sehingga instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan.

b) Kepatuhan Wajib Pajak ASN

Tabel 4. 9 Uji Reliabilitas Variabel Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.678	8

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji coba instrumen pada 121 responden uji coba kemudian dianalisis menggunakan bantuan SPSS Statistic 23 diperoleh nilai Cronbach's Alpha variabel Kepatuhan Wajib Pajak ASN juga lebih besar dari 0,1502 sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini layak di gunakan.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil perhitungan SPSS:

Tabel 4. 10 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		121
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88175499
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.187
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov dengan Kepatuhan Wajib pajak ASN sebagai variabel dependen adalah 0,128 dan signifikansi 0,063

yang nilainya diatas 0,05. Besarnya nilai ini mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi normal.

b) Uji Multikoloniaritas

Tabel 4. 11 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TOTAL_Y	1.000	1.000

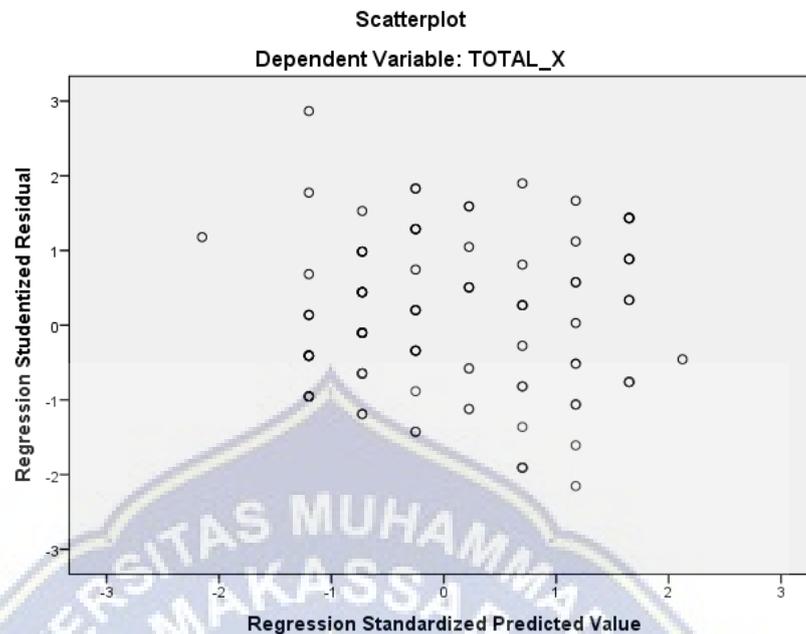
a. Dependent Variable: TOTAL_X

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Apabila tolerance $\geq 0,10$ (10%) dan $VIF \leq 10$.

Berdasarkan tabel Output SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance yaitu sebesar $1,000 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1.000 < 10$. Maka dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.



Gambar 4. 2 Scatterplot Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplot hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS di atas dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik pada gambar tersebut tidak terdapat pola tertentu seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar atau sebaliknya. Maka, dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

4. Uji Hipotesis

a) Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah suatu metode statistik yang berfungsi untuk menguji seberapa besar hubungan antara variabel X dan variabel Y. Regresi linear sederhana sebagai kajian terhadap hubungan suatu variabel yang disebut sebagai kajian terhadap suatu hubungan variabel. Metode regresi linier sederhana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji regresi linier digunakan untuk

mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak ASN pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar. Adapun hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier SPSS 23

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.387	2.586		6.336	.000
	TOTAL_X	.458	.084	.449	5.480	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan WPOP ASN

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) diatas, maka diperoleh nilai persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,387 + 0,458X$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier sederhana memiliki nilai konstan sebesar 16.387, besaran ini menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan konstan. Selain itu dapat juga diartikan Setiap penambahan 1% koefisien x maka terjadi penambahan sebesar 0,458 koefisien Y.

b) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Penerapan Sistem *E-filing* (X) terhadap variabel terikatnya WPOP ASN. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat masing-masing kolom signifikan pada t_{tabel} , Ika Puspita (2018). Dapat dilihat pada hasil pengujian regresi linear.

Tabel 4. 13 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.387	2.586		6.336	.000
	TOTAL_X	.458	.084	.449	5.480	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan WPOP ASN

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear, menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ditunjukkan dengan nilai *unstandardized coefficients B* sebesar 0,458 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang juga ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,480 dan t_{tabel} sebesar 1,657 yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi ASN

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel yaitu variabel bebas Penerapan Sistem *E-filing* dan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN. Sistem *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menentukan persamaan analisis regresi sederhana, sebelumnya telah dilakukan uji validitas yang

mana semua angket dari kuesioner dari variabel X yaitu Penerapan Sistem *E-filing* dan variabel Y yaitu Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan valid setelah memperoleh data dan menganalisis dengan menggunakan SPSS. Untuk meyakinkan item-item angket Penerapan Sistem *E-filing* dan Kepatuhan WPOP kembali dilakukan pengujian reliabilitas yang dimana terbukti bahwa item-item dari kuesioner variabel X Penerapan Sistem *E-filing* dan variabel Y Kepatuhan WPOP dikatakan reliabel karena nilai alpha lebih besar dari r_{tabel} .

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan secara deskriptif dan juga perhitungan SPSS, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0.001 < 0.05$). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penerapan sistem *e-filing* terbukti meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden mengenai kecepatan, kemudahan, kehematan, kelengkapan data dalam pengisian SPT dan kebenaran perhitungan pengisian SPT yang dilakukan dalam *e-filing* tersebut. Wajib pajak setuju bahwa dengan diterapkannya *e-filing* ini proses penyampaian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi lebih mudah sehingga hal tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian kewajiban SPTnya, Wajib Pajak menjadi lebih tepat waktu dalam menyampaikan SPT, sehingga wajib pajak tidak memiliki tunggakan atau denda pajak yang harus dikenakan saat wajib pajak tersebut telat

melakukan penyampaian laporan perpajakannya. Meningkatnya kebutuhan wajib pajak, kemudian didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga para wajib pajak dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai pelaporan perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Wahyudi, 2021) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Penerapan Sistem *E-Billing*, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudi menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi dapat menerima modernisasi sistem perpajakan, dilihat dari jawaban pernyataan responden yang diberikan, wajib pajak menyatakan bahwa merasakan kemudahan dari penggunaan sistem *e-filing* ini sehingga dirasa wajib pajak lebih cepat, memudahkan dalam pelaporan, lebih hemat dan ramah lingkungan dalam menjalankannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ditunjukkan dengan nilai unstandardized coefficients B sebesar 0,458 (positif) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang juga ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,480 dan t_{tabel} sebesar 1,657 yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Dari hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu :

1. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filing* lebih disederhanakan supaya sistem *e-filing* mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-filing*.
2. Perlu adanya sosialisasi yang berulang dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai penyampaian SPT PPh melalui sistem *e-filing* khususnya pada ASN/TNI/Polri.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan mengembangkan jumlah variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, Eka Rizqi, and Endah Sulistyowati. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(2): 1–17. <http://www.pajak.go.id>.
- Aisyah, Nurul. 2015. "Menurut Prof . Dr . Rochmat Soemitro , SH Dalam Bukunya Mardiasmo (2011 : 1) : " Pajak Adalah Iuran Rakyat Kepada Kas Negara Berdasarkan Undang - Undang (Yang Dapat Dipaksakan) Dengan Tiada Mendapat Jasa Timbal (Kontra Prestasi) Yang Langsung Dapat ." II(1): 1–8.
- Alfian, Rahmat. 2013. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan." *e-Perpajakan*: 1–19.
- Anugrahi, Rachelyta, Hendrik Manossoh, and Steven J. Tangkuman. 2018. "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1): 191–99.
- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala, and MSA Majid. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4(2): 318–34.
- Budiman andriyani nita, Mulyani sri, Wijayani Ratna Dianing. 2019. *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Caroline, Christine Clara. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan M-Banking Berdasarkan Teori Tam." *Keunis* 9(2): 160.
- Ednoer, Elzami Haqie, Sondy Akbar Ardiansyah, and Amrie Firmansyah. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Penganggaran Dengan Indikator Sstandar Biaya Pada Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Jurnalku* 3(1): 107–18.
- Esameralda, Lucia, Tri Ciptanigsih, and Mochamad Arif Budiarto. 2022. "Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* 10(2): 38–51.
- Gusman, Hengky. 2014. "Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi." *UIB Repository*: 10–42. <http://repository.uib.ac.id/490/>.
- Hakim, Zulkarnain, Lilik Handajani, and Biana Adha Inapty. 2017. "Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi." *Jurnal Akuntansi* 21(2): 253.
- Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl. 2008. "Enforced versus Voluntary Tax Compliance : The " Slippery Slope " Framework." 29: 210–25.
- Komara, Endang. 2019. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia." *Mimbar Pendidikan* 4(1): 73–84.
- Lado, Yuliano Osvaldo, and M. Budiantara. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 4(1): 59.

- Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. 2021. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5(2): 176–95.
- Muehlbacher, Stephan, Erich Kirchler, and Herbert Schwarzenberger. 2011. "Voluntary versus Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence for the "Slippery Slope" Framework." : 89–97.
- Muhammad, Nurchamid, and Dewi Sutjahyani. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari." *Ekonomi Akuntansi* 3: 41–54.
- Mulyati, Akib, and Amdayani Lia. 2013. "Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*: 40–52.
- Mulyati, Yetti, and Juli Ismanto. 2021. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud." *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4(2): 139.
- Nanang. 2017. "Penerapan Pajak Penghasilan SPT Masa Paja Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza." *Ekonomia* 6(2): 137–45.
- Nesdi Evryliyan Rozanda, Arita Masriana. 2017. "Perbandingan Metode Hot Fit Dan Tam Dalam Mengevaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi Kasus: Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)." *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI)* 9 ISSN 2579: 18–19.
- Ngadiman, Luciana. 2021. "14930-43872-2-Pb (6)." III(3): 1342–51.
- Nurhayati, Erni, and Nur Hidayat. 2019. "Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 4(2): 1–13.
- Pradilatri, Kemuning, Yustiana Dajelani, and Dwi Yana Amalia Sari Fala. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi." *Jeamm* 2(April): 51–62.
- Pradnyana, I, and P Prena. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi)." *Bisnis dan Akuntansi* 18(1): 56–65.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>.
- Putri, A A. 2018. "Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 8: 2.
- Ratmono, Dwi. 2015. "Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Penjelasan Teori Slippery Slope." *Buletin Ekonomi* 13(1): 59–76.
- Rifani, Riza Amalia, and Ismi Ayu Lestari. 2022. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara." *Jurnal Riset Perpajakan* 1(2): 20–26.

www.pajak.go.id.

- Saputri, Silvana, and Yuliasuti Rahayu. 2021. "Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(7): 1–14.
- Sari, Nense Wulan. 2021. "Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurja* 1(1): 47–59.
- Shofira, Ania Zahra, Wahyu Widodo Rodhiawan, and Direktorat Jenderal Pajak. 2021. "Jurnalku Volume 1 No. 1, Maret 2021 Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan." 1(1): 30–39.
- Solekhah, Puput. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo." 1(1): 74–90.
- Syafira, Lucky Kirana Mutiara. 2018. "Pengaruh Penggunaan E-Filing Dan Pemahaman Tentang Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi." : 1–121.
- Wahyudi, Agus. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(2): 299–308.



L
A
M
P
I
R
A
N



Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN MENGENAI PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA ASN DI KANTOR DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

- **Petunjuk Pengisian Kuesioner**

E-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda (X) atau checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu/ Saudara/ i bekerja.

- Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Data Responden

1. **Nama Bapak/Ibu:**
2. **Jenis Kelamin:**
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. **Umur Tahun**
4. **Pendidikan Terakhir**
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana (S1)
 - d. Magister
 - e. Lainnya (sebutkan).....
5. **Pengalaman Menggunakan Sistem E-Filing**
 - a. < 1 Tahun
 - b. 1-2 Tahun
 - c. > 2 Tahun



Kuesioner Mengenai Penerapan Sistem E-filing

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan adanya <i>e-filing</i> lebih hemat dalam pelaporan pajak					
2	Dengan adanya <i>e-filing</i> saya merasa lebih efisien dan memanfaatkan waktu					
3	Lebih praktis dan dapat dilakukan dimana saja					
4	Saya merasa bahwa menggunakan <i>e-filing</i> biaya lebih murah					
5	Penghitungan dilakukan lebih cepat karena menggunakan sistem komputer					
6	Data yang disampaikan Wajib Pajak lengkap					
7	Dapat mengurangi limbah kertas					

Kuesioner Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT					
2	Saya selalu patuh terhadap aturan pemerintah mengenai pembayaran SPT					
3	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak					
4	Setiap kegiatan ASN senantiasa diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)					
5	Saya tidak pernah di pidana terkait pelanggaran pajak					
6	Saya mengisi dengan jujur dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan					
7	Saya tidak perlu menggunakan dokumen pelengkap seperti KTP dll, kecuali diminta oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak					
8	Saya menyampaikan SPT ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebelum batas waktu					

LAMPIRAN 2 : TABULASI DATA VARIABEL X

NO	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	TOTAL
1	4	4	5	4	5	5	5	32
2	4	5	4	5	4	4	5	31
3	5	5	4	5	5	5	5	34
4	4	5	5	5	5	5	5	34
5	4	4	4	5	4	4	5	30
6	5	5	5	5	4	5	4	33
7	5	5	5	4	5	5	5	34
8	4	4	4	4	4	4	5	29
9	5	5	5	4	4	4	5	32
10	4	4	4	4	4	4	5	29
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	5	5	4	4	5	31
13	4	4	4	4	4	4	5	29
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	4	4	4	4	5	4	5	30
17	5	5	5	5	4	4	5	33
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	5	4	5	5	5	5	5	34
20	5	5	4	4	5	4	5	32
21	5	4	4	4	4	4	5	30
22	4	4	4	4	5	4	5	30
23	5	5	5	5	4	5	5	34
24	4	4	5	4	4	5	4	30
25	4	5	4	4	5	4	5	31
26	4	5	5	4	5	5	4	32
27	4	5	5	4	4	5	5	32
28	5	5	5	5	4	5	4	33
29	4	4	4	4	4	5	5	30
30	5	5	5	4	4	4	4	31
31	4	4	5	4	4	4	5	30
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	5	4	5	5	4	4	4	31
35	4	5	4	4	4	4	4	29
36	4	4	5	4	4	4	4	29
37	4	5	4	4	4	4	4	29

38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	4	4	4	5	5	5	31
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	4	4	4	4	4	5	29
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	5	5	5	4	4	4	4	31
46	5	5	5	5	5	5	5	35
47	5	4	4	4	4	4	5	30
48	4	5	4	5	4	4	4	30
49	4	4	5	4	4	4	5	30
50	4	4	4	4	4	4	4	28
51	5	4	4	4	5	4	4	30
52	4	4	4	4	4	4	5	29
53	4	4	4	5	4	4	4	29
54	4	4	4	4	4	4	5	29
55	4	4	4	4	4	4	5	29
56	4	4	4	5	4	4	5	30
57	4	4	4	4	4	4	5	29
58	4	4	5	5	4	5	5	32
59	4	5	5	4	4	4	5	31
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	5	5	5	4	4	5	32
62	4	5	4	4	4	5	5	31
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	5	5	5	4	4	5	4	32
65	4	4	4	4	4	4	5	29
66	4	4	5	4	4	4	5	30
67	4	4	4	4	4	4	5	29
68	4	4	4	4	4	4	5	29
69	4	4	4	4	4	4	5	29
70	4	5	4	4	4	5	5	31
71	4	4	4	5	4	4	5	30
72	4	4	5	4	4	4	5	30
73	5	5	5	5	4	4	5	33
74	4	4	4	4	4	4	4	28
75	5	5	5	4	4	4	5	32
76	4	5	5	4	4	4	5	31
77	4	4	4	4	4	4	5	29

78	4	4	5	5	5	5	5	33
79	4	4	5	5	4	4	5	31
80	5	4	4	4	4	4	5	30
81	4	4	5	4	4	5	5	31
82	4	4	4	5	5	4	5	31
83	4	4	4	4	4	4	5	29
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	5	4	4	4	4	4	29
86	4	4	4	4	5	5	4	30
87	4	4	5	4	4	4	5	30
88	4	4	5	5	5	5	5	33
89	4	4	5	5	4	5	4	31
90	4	5	5	4	4	4	5	31
91	4	4	4	4	5	5	5	31
92	5	5	5	5	4	4	5	33
93	5	5	5	5	5	5	5	35
94	4	4	4	4	4	4	4	28
95	4	5	5	5	5	5	4	33
96	4	5	4	5	4	4	4	30
97	4	5	4	4	4	4	5	30
98	4	4	5	5	5	4	5	32
99	5	5	4	4	5	4	5	32
100	4	4	4	4	5	5	5	31
101	5	4	5	5	5	4	4	32
102	4	4	4	4	4	4	4	28
103	5	5	5	4	5	5	5	34
104	5	5	4	4	4	4	5	31
105	5	5	5	5	5	4	4	33
106	5	5	5	5	5	5	5	35
107	5	4	4	4	4	4	5	30
108	4	4	4	5	4	5	5	31
109	5	4	4	4	5	5	5	32
110	5	5	5	5	5	5	5	35
111	5	5	5	5	5	5	5	35
112	4	4	5	4	4	4	5	30
113	5	5	5	5	4	4	5	33
114	4	4	4	4	4	4	4	28
115	4	4	4	4	5	5	5	31
116	5	5	5	5	5	5	5	35
117	5	5	4	5	4	5	5	33

118	4	4	5	5	5	4	5	32
119	5	5	5	4	4	5	5	33
120	5	5	5	4	5	5	5	34
121	5	5	5	4	5	5	5	34
R HIT	0.672	0.647	0.685	0.593	0.613	0.669	0.430	
R TAB	0.1502							
v/T	V							

LAMPIRAN 3 : TABULASI DATA VARIABEL Y

NO.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	TOTAL
1	3	3	5	5	3	4	4	5	32
2	4	3	4	4	3	3	3	4	28
3	3	4	5	5	4	4	4	5	34
4	3	3	4	4	4	4	4	4	30
5	3	3	5	5	4	4	4	5	33
6	4	3	5	5	3	4	4	5	33
7	3	3	4	4	3	4	4	4	29
8	3	3	4	4	3	3	3	4	27
9	3	3	4	5	4	4	3	4	30
10	3	3	4	4	3	3	3	4	27
11	3	3	5	5	4	3	4	5	32
12	3	3	5	5	4	4	4	5	33
13	3	3	4	5	3	4	4	4	30
14	3	3	4	5	4	3	3	4	29
15	4	4	5	5	4	4	4	5	35
16	3	3	4	4	3	4	4	4	29
17	3	4	5	5	4	4	4	5	34
18	4	3	5	5	3	4	3	5	32
19	3	3	4	5	3	4	4	4	30
20	3	3	4	4	3	3	4	4	28
21	3	3	4	5	3	3	3	4	28
22	4	3	4	5	4	3	3	4	30
23	3	4	5	5	4	4	4	5	34
24	3	3	5	4	3	4	3	5	30
25	4	3	4	5	4	4	4	4	32
26	4	4	5	4	4	4	3	5	33
27	3	3	5	4	3	4	3	5	30
28	4	4	5	5	4	4	4	5	35
29	4	4	5	4	3	4	4	5	33

30	3	3	4	5	3	4	3	4	29
31	4	4	4	4	3	4	4	4	31
32	3	3	4	4	3	3	3	4	27
33	4	3	5	5	3	3	4	5	32
34	3	3	4	4	3	3	4	4	28
35	3	4	4	4	3	3	3	4	28
36	3	3	5	5	4	4	3	5	32
37	3	4	4	4	3	3	3	4	28
38	3	3	4	4	3	3	3	4	27
39	4	3	4	4	3	3	3	4	28
40	4	3	5	5	4	4	4	5	34
41	3	4	4	4	3	3	3	4	28
42	3	3	4	4	3	3	3	4	27
43	4	3	5	5	3	3	3	5	31
44	4	3	4	4	3	4	3	4	29
45	3	4	5	5	3	4	3	5	32
46	4	3	5	5	4	4	4	5	34
47	3	3	4	5	3	3	4	4	29
48	3	4	5	5	3	4	3	5	32
49	3	3	4	5	3	3	3	4	28
50	3	3	4	4	3	3	3	4	27
51	3	3	4	5	3	3	3	4	28
52	3	3	5	5	3	3	3	5	30
53	3	3	4	4	3	3	3	4	27
54	3	3	4	5	3	3	3	4	28
55	3	3	4	4	3	3	3	4	27
56	3	3	4	5	3	3	3	4	28
57	3	3	4	5	3	3	3	4	28
58	3	4	4	5	3	4	3	4	30
59	3	3	5	4	3	3	3	5	29
60	3	3	4	4	3	3	3	4	27
61	3	4	4	4	3	3	3	4	28
62	3	3	4	5	3	3	3	4	28
63	3	3	4	4	3	3	3	4	27
64	3	4	4	5	3	4	3	4	30
65	3	3	4	5	3	3	3	4	28
66	3	3	5	4	3	3	3	5	29
67	3	3	4	4	3	3	3	4	27
68	3	3	5	5	3	3	3	5	30
69	3	4	4	4	3	3	3	4	28

70	3	3	4	5	3	3	3	4	28
71	3	3	4	4	3	3	3	4	27
72	3	3	4	4	3	3	3	4	27
73	3	4	4	5	3	4	4	4	31
74	3	3	4	5	3	3	3	4	28
75	3	3	4	5	3	4	3	4	29
76	3	3	4	5	3	3	4	4	29
77	3	3	4	4	3	3	3	4	27
78	3	3	4	5	3	4	3	4	29
79	3	3	4	4	3	3	3	4	27
80	3	3	4	4	3	3	3	4	27
81	3	3	4	4	3	3	3	4	27
82	3	4	5	5	4	4	4	5	34
83	3	4	5	4	4	4	4	5	33
84	3	3	4	4	3	3	3	4	27
85	3	4	4	4	3	3	3	4	28
86	3	4	5	5	4	4	3	5	33
87	3	4	4	5	3	3	3	4	29
88	3	3	4	5	4	3	3	4	29
89	3	4	5	4	3	3	3	5	30
90	4	4	5	5	3	4	4	5	34
91	4	3	4	4	3	3	3	4	28
92	3	3	4	5	3	3	4	4	29
93	4	3	5	5	3	4	3	5	32
94	4	3	4	4	4	3	3	4	29
95	3	3	4	4	3	3	3	4	27
96	3	4	5	5	4	4	3	5	33
97	4	3	4	4	3	3	3	4	28
98	3	4	4	4	3	3	3	4	28
99	4	4	5	5	4	4	4	5	35
100	4	3	4	4	3	3	3	4	28
101	4	3	5	5	3	4	3	5	32
102	3	4	5	4	4	4	3	5	32
103	4	3	4	4	4	3	3	4	29
104	3	4	5	5	4	4	4	5	34
105	3	3	4	5	3	3	3	4	28
106	4	3	5	5	4	4	4	5	34
107	4	3	4	4	4	4	4	4	31
108	4	4	5	5	4	4	4	5	35
109	4	3	4	4	3	3	3	4	28

110	4	3	5	5	4	4	4	5	34
111	3	3	4	4	3	3	3	4	27
112	3	4	5	4	3	3	3	5	30
113	4	3	5	4	3	4	4	5	32
114	3	4	5	5	4	4	4	5	34
115	4	4	5	5	4	4	4	5	35
116	4	4	5	5	4	4	4	5	35
117	3	4	5	4	3	3	3	5	30
118	4	3	4	4	4	4	4	4	31
119	4	4	5	5	4	4	4	5	35
120	3	4	5	5	4	4	4	5	34
121	4	4	5	5	4	4	4	5	35
R HIT	0.4605	0.516	0.8283	0.5555	0.7127	0.7915	0.6834	0.8283	
R TAB	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	
V/T	V	V	V	V	V	V	V	V	

LAMPIRAN 4 : HASIL UJI VALIDITAS SPSS 23

UJI VALIDITAS VARIABEL X

Correlations

		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	TOTAL_X
X01	Pearson Correlation	1	.530**	.382**	.276**	.296**	.276**	.135	.672**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.001	.002	.140	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
X02	Pearson Correlation	.530**	1	.397**	.263**	.183*	.299**	.087	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.044	.001	.345	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
X03	Pearson Correlation	.382**	.397**	1	.398**	.223*	.363**	.153	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.014	.000	.094	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
X04	Pearson Correlation	.276**	.263**	.398**	1	.245**	.262**	.108	.593**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004	.000		.007	.004	.237	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
X05	Pearson Correlation	.296**	.183*	.223*	.245**	1	.510**	.217*	.613**
	Sig. (2-tailed)	.001	.044	.014	.007		.000	.017	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
X06	Pearson Correlation	.276**	.299**	.363**	.262**	.510**	1	.183*	.669**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000	.004	.000		.044	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
X07	Pearson Correlation	.135	.087	.153	.108	.217*	.183*	1	.430**
	Sig. (2-tailed)	.140	.345	.094	.237	.017	.044		.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121
TOTAL_X	Pearson Correlation	.672**	.647**	.685**	.593**	.613**	.669**	.430**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	121	121	121	121	121	121	121	121

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS VARIABEL Y

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.015	.273**	.060	.300**	.302**	.297**	.273**	.460**
	Sig. (2-tailed)		.867	.002	.512	.001	.001	.001	.002	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y2	Pearson Correlation	.015	1	.404**	.108	.295**	.353**	.214*	.404**	.516**
	Sig. (2-tailed)	.867		.000	.238	.001	.000	.018	.000	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y3	Pearson Correlation	.273**	.404**	1	.361**	.457**	.551**	.391**	1.000*	.828**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y4	Pearson Correlation	.060	.108	.361**	1	.342**	.396**	.323**	.361**	.556**
	Sig. (2-tailed)	.512	.238	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y5	Pearson Correlation	.300**	.295**	.457**	.342**	1	.515**	.488**	.457**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y6	Pearson Correlation	.302**	.353**	.551**	.396**	.515**	1	.573**	.551**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y7	Pearson Correlation	.297**	.214*	.391**	.323**	.488**	.573**	1	.391**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.001	.018	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Y8	Pearson Correlation	.273**	.404**	1.000**	.361**	.457**	.551**	.391**	1	.828**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.460**	.516**	.828**	.556**	.713**	.792**	.683**	.828**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	121	121	121	121	121	121	121	121	121

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Test

Notes

Output Created		13-DEC-2023 01:57:02
Comments		
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Matrix Input	DataSet0 <none> <none> <none> 121
Missing Value Handling	Definition of Missing Cases Used	User-defined missing values are treated as missing. Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time Elapsed Time	00:00:00.02 00:00:00.02

Scale: VARIABLES X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	121	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	121	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X01	26.53	3.168	.514	.679
X02	26.45	3.183	.471	.689
X03	26.40	3.093	.519	.677
X04	26.52	3.318	.411	.703
X05	26.55	3.299	.441	.696
X06	26.52	3.168	.509	.680
X07	26.17	3.645	.221	.745

Reliability Test

		Notes	
Output Created			13-DEC-2023 01:59:22
Comments			
Input	Active Dataset	DataSet0	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		121
	Matrix Input		
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.	
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time		00:00:00.00
	Elapsed Time		00:00:00.01

Scale: VARIABLES Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	121	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	121	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.678	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	27.23	3.763	.259	.673
Y2	27.21	3.649	.316	.660
Y3	26.12	3.160	.589	.590
Y4	25.99	3.442	.400	.640
Y5	27.21	3.220	.596	.592
Y6	27.07	3.012	.674	.565
Y7	27.17	3.256	.542	.604
Y8	25.70	4.911	-.350	.780

Regression Test (Uji Asumsi Klasik)

Notes

Output Created	13-DEC-2023 01:30:42	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	121
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT TOTAL_Y /METHOD=ENTER TOTAL_X.	
Resources	Processor Time	00:00:00.06
	Elapsed Time	00:00:00.01
	Memory Required	1700 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL_X ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.449 ^a	.202	.195	1.890

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.387	2.586		6.336	.000
	TOTAL_X	.458	.084	.449	5.480	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

LAMPIRAN 5 : SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor :65/05/A.2-II/VIII/45/2023
2023

Makassar, 15 Agustus

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Zulfina Rahmi

Stambuk 1057311120919

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar

2. Arsip

LAMPIRAN 6 : SURAT IZIN PENELITIAN DARI PTSP



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 30276/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2280/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ZULFINA RAHMI
Nomor Pokok	: 105731120919
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 November s/d 28 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

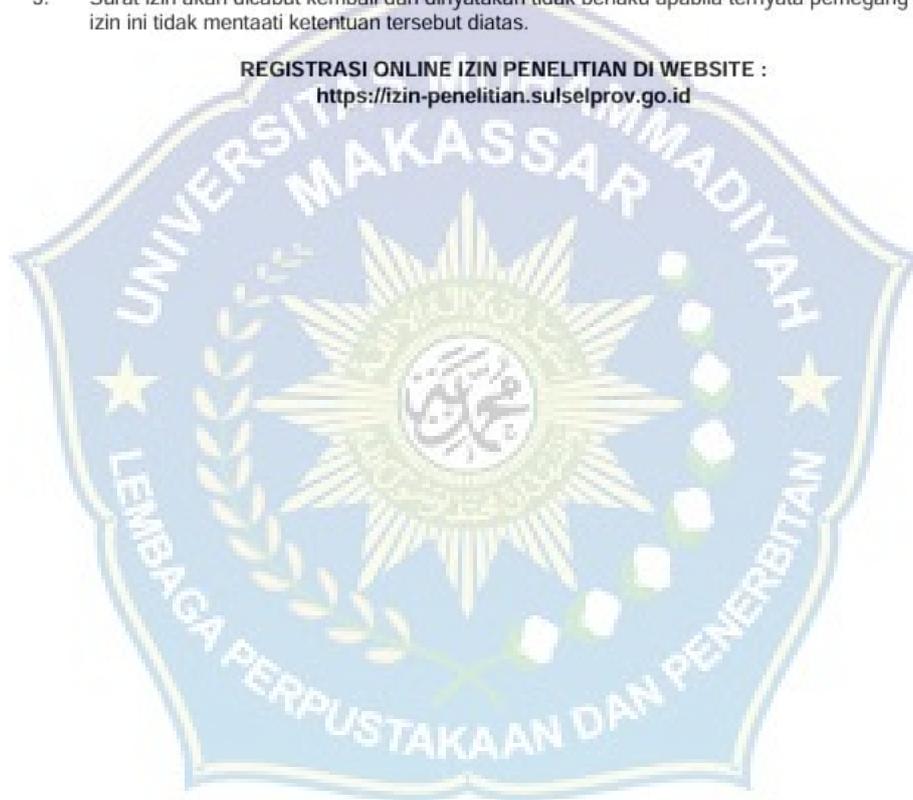
Nomor: 30276/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampulard hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20231128381692



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



LAMPIRAN 7 : SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562
 M A K A S S A R 90232

Makassar, 30 November 2023

Kepada

Nomor : 410/ 322 1/Set. DPRD. Lamp Perihal : Jawaban Izin Penelitian	Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di- Makassar
--	--

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara nomor 30276/S.01/PTSP/2023, tanggal 28 November 2023 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa pada prinsipnya kami bersedia menerima mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama No. Pokok Program Studi Judul Usulan Skripsi	ZULFINA RAHMI 105731120919 AKUNTANSI PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)
--	---

Dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar kiranya Mahasiswa tersebut dapat mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD PROV. SULSEL


Drs. M. JABIR, M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19661031 196709 1001

Tembusan Yth.
 1. Para Kabag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
 2. Para Kasubbag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
 3. Pertinggal.

LAMPIRAN 8 : DOKUMENTASI PADA SAAT PENELITIAN

LAMPIRAN 9 : VALIDASI DATA KUANTITATIF



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUANTITATIF

NAMA MAHASISWA	ZULFINA RAHMI			
NIM	105731120919			
PROGRAM STUDI	AKUNTANSI			
JUDUL SKRIPSI	PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)			
NAMA PEMBIMBING 1	Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA			
NAMA PEMBIMBING 2	Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si.			
NAMA VALIDATOR	ASRIANI HASAN, SE., M.Sc.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf ¹
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)	05/01/24	OK	
2	Sumber data (data sekunder)	05/01/24	OK (Menggunakan Data Primer)	
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)	05/01/24	OK (File yang dikumpulkan berupa data Excel)	
4	Hasil Statistik deskriptif	05/01/24	OK	
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	05/01/24	- Harap Revisi Tabel Hasil Uji Reabilitas(Angka dituliskan secara lengkap dan jangan dicopy paste dari SPSS)	
6	Hasil Uji Asumsi Statistik	05/01/24	- Harap Revisi Tabel Hasil Uji Normalitas (Angka dituliskan secara lengkap dan jangan dicopy paste dari SPSS) - Tambahkan Uji Prasyarat yang lain untuk dapat menggunakan analisis regresi linier (Misalnya : Uji Heteroskedastisitas, Uji Linier, dan lain – lain)	
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	05/01/24	- Harap Revisi Tabel Hasil Uji Regresi Linier (Angka dituliskan secara lengkap dan jangan dicopy paste dari SPSS) - Harap Revisi Tabel Hasil Uji T (Angka dituliskan secara lengkap dan jangan dicopy paste dari SPSS)	
8	Hasil interpretasi data	05/01/24	OK	
9	Dokumentasi	05/01/24	OK	

¹Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

²Catatan : Hasil Validasi ini disetujui untuk mengikuti seminar hasil. Namun catatan usulan perbaikan wajib direvisi sebelum Ujian Skripsi.

LAMPIRAN 10 : VALIDASI ABSTRAK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		Zulfina Rahmi		
NIM		105731120919		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris Pada ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar)		
NAMA PEMBIMBING 1		Andi Arman, S.E, M.Si, AK, CA		
NAMA PEMBIMBING 2		Sitti Zulaeha, S.Pd, M.Si		
NAMA VALIDATOR		M. Hidayat, S.E, MM		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	24 Januari 2024	1. Penulisan (terlampir pada catatan dapat dilihat dengan cara, open word->review->show markup)	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

LAMPIRAN 11 : HASIL TURNITIN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Zulfina Rahmi

Nim : 105731120919

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Zulfina Rahmi, S.Pd, M.L.P
NIM. 105731120919

Zulfina Rahmi 105731120919

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276452887

File name: BAB_I_ZULFINA_RAHMI_1.docx (30.66K)

Word count: 1340

Character count: 8756

Zulfina Rahmi 105731120919 BAB I

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

4%

2

e-journal.hamzanwadi.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Zulfina Rahmi 105731120919

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276453216

File name: BAB_II_ZULFINA_RAHHMI_1.docx (110.59K)

Word count: 3233

Character count: 21003

Zulfina Rahmi 105731120919 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

17%

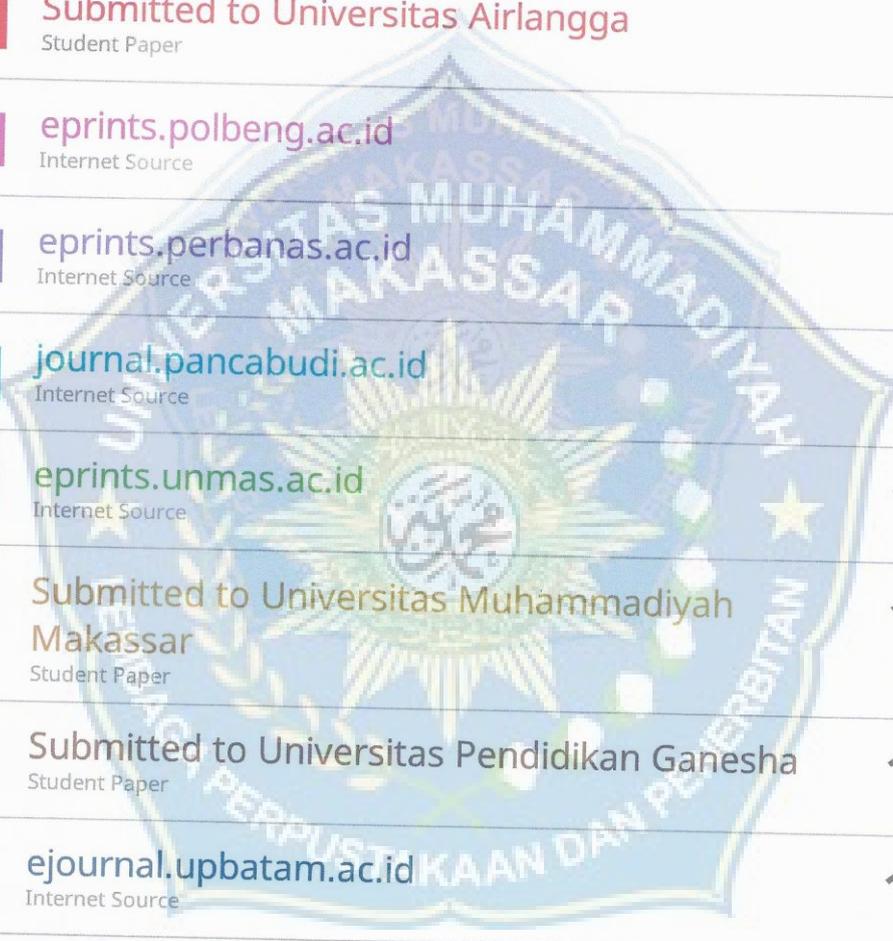
PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.isas.or.id Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
4	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
7	www.kumpulanpengertian.com Internet Source	1%
8	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Pakuan Student Paper	1%



10	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
12	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
14	eprints.polbeng.ac.id Internet Source	1%
15	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1%
16	journal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
17	eprints.unmas.ac.id Internet Source	1%
18	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
19	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
20	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	1%
21	repository.trisakti.ac.id	

Internet Source

1%

22 repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



Zulfina Rahmi 105731120919

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276453613

File name: BAB_III_ZULFINA_RAHMI_1.docx (32.66K)

Word count: 1297

Character count: 8084

Zulfina Rahmi 105731120919 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX	8% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	repository.unmuha.ac.id:8080 Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



Zulfina Rahmi 105731120919

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276454157

File name: BAB_IV_ZULFINA_RAHMI_1.docx (173.95K)

Word count: 4130

Character count: 25675

Zulfina Rahmi 105731120919 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	dprd.sulselprov.go.id Internet Source	2%
3	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Zulfina Rahmi 105731120919
BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276455705

File name: BAB_V_ZULFINA_RAHMI_1.docx (16.15K)

Word count: 180

Character count: 1129

Zulfina Rahmi 105731120919 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Irmayanti Irmayanti, I Wayan Darmadi, Supriyatman Supriyatman. "Pengaruh Pendekatan Saintifik dalam Strategi Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Siswa Kelas X SMA Negeri 08 Palu" JPFT (Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online), 2018
Publication 4%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BIOGRAFI PENULIS



ZULFINA RAHMI, panggilan Fina lahir di Bulukumba pada tanggal 29 April 2001 dari pasangan suami istri Bapak Samli dan Ibu Rahbiah. Peneliti adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang tinggal Bersama kedua orang tua kandung dan bertempat tinggal di Dusun Passimbungan Desa Anrihua Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 53 Pabbaeng-Baeng lulus pada tahun 2013. SMP Negeri 2 Bulukumba lulus tahun 2016. SMA Negeri 12 Bulukumba lulus pada tahun 2019 dan mulai tahun 2019 mendaftar dan kuliah pada Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

